



SALINAN

# WALI KOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 000.8.1/Kep.317-Huk/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 000.8.1/KEP.96-HUK/2023

TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 000.8.1/Kep.96-Huk/2023 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama jabatan, kelas jabatan, dan kebutuhan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, maka perlu dilakukan perubahan peta jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 000.8.1/Kep.96-Huk/2023 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1028);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 31);
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 31);
16. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 061/Kep.211-Huk/2020 tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perihal Rapat Perubahan Peta Jabatan ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, tanggal 28 Agustus 2023;

2. Berita Acara Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perihal Rapat Perubahan Peta Jabatan ASN pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, tanggal 29 Agustus 2023;
3. Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 061.1/ND-1280/Org/2023, tanggal 29 Agustus 2023 Hal Penyampaian Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 061.1/Kep.197-Huk/2022 tentang Peta Jabatan ASN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 000.8.1/KEP.96-HUK/2023 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 000.8.1/Kep.96-Huk/2023 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Pasal II

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 10 Oktober 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan kepada:

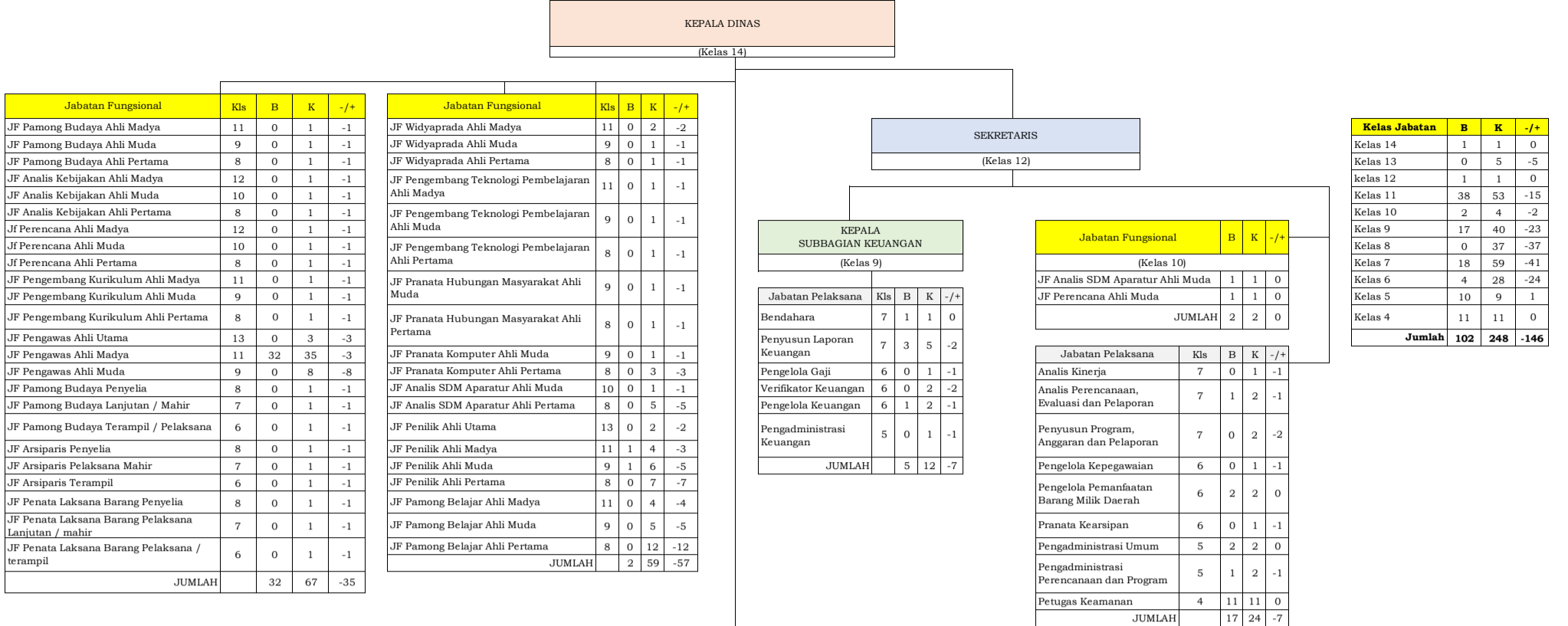
1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 23 Oktober 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

**PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Kelas Jabatan	B	K	-/+
Kelas 14	1	1	0
Kelas 13	0	5	-5
Kelas 12	1	1	0
Kelas 11	38	53	-15
Kelas 10	2	4	-2
Kelas 9	17	40	-23
Kelas 8	0	37	-37
Kelas 7	18	59	-41
Kelas 6	4	28	-24
Kelas 5	10	9	1
Kelas 4	11	11	0
<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>248</b>	<b>-146</b>

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
(Kelas 11)

**KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	1	1	0
Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>	

**KEPALA SEKSI PESEKTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Peserta Didik	7	0	1	-1
Pengelola Peserta Didik	7	0	1	-1
Teknisi Pembentukan Karakter	6	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	

Jabatan Fungsional	B	K	-/+
(Kelas 9)			
JF Widyaprada Ahli Muda	1	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	0	1	-1
Analisis Penilaian dan Akreditasi	7	0	2	-2
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	6	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**  
(Kelas 11)

**KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	0	1	-1
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>	

**KEPALA SEKSI PESEKTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Peserta Didik	7	0	2	-2
Pengelola Peserta Didik	6	0	1	-1
Teknisi Pembentukan Karakter	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>	

Jabatan Fungsional	B	K	-/+
(Kelas 9)			
JF Widyaprada Ahli Muda	1	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	1	1	0
Analisis Penilaian dan Akreditasi	7	0	2	-2
Analisis Pengembangan Peserta Didik	7	1	1	0
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-4</b>	

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
(Kelas 11)

**KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	0	2	-2
Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	0	2	-2
Analisis Data dan Informasi	7	2	2	0
Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	3	3	0
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>-5</b>	

**KEPALA SEKSI PESEKTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Peserta Didik	7	1	2	-1
Analisis Data dan Informasi	7	0	1	-1
Teknisi Pembentukan Karakter	6	0	1	-1
Pengelola Peserta Didik	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	2	2	0
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>	

Jabatan Fungsional	B	K	-/+
(Kelas 9)			
JF Widyaprada Ahli Muda	1	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	1	1	0
Analisis Penilaian dan Akreditasi	7	0	2	-2
Analisis Data dan Informasi	7	2	2	0
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>-3</b>	

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**  
(Kelas 11)

**KEPALA SEKSI PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	7	1	1	0
Analisis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	7	0	2	-2
Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>	

**KEPALA SEKSI PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR**  
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	1	2	-1
Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	1	2	-1
Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-3</b>	

Jabatan Fungsional	B	K	-/+
(Kelas 9)			
JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	1	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Kursus dan Kesetraan	7	0	1	-1
Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	0	1	-1
Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	

**KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**  
(Kelas 11)

**Jabatan Fungsional**  
(Kelas 9)

Jabatan Fungsional	B	K	-/+
(Kelas 9)			
JF Pamong Budaya Ahli Muda	3	3	0
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum	7	1	1	0
Analisis Sumber Sejarah	7	0	1	-1
Analisis Apresiasi Karya Seni	7	0	1	-1
Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7	0	1	-1
Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	0	1	-1
Pengolah Data	6	0	1	-1
Pengelola Data Sejarah	6	0	1	-1
Pengelola Data Kesenian dan Perfilman	6	0	1	-1
Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	5	1	1	0
Petugas Keamanan	4	13	13	0
<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>-7</b>	

**PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

KEPALA UPTD SPNF SKE (Kelas 9)
--------------------------------------

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	-/+
JF Pamong Belajar Ahli Madya	11	0	4	-4
JF Pamong Belajar Ahli Muda	9	0	5	-5
JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	0	12	-12
<b>JUMLAH</b>		0	21	-21

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA (Kelas 8)
---

Jabatan Pelaksana	Kls	B	K	-/+
Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	0	1	-1
Analisis Pengembangan Peserta Didik	7	1	1	0
Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>		1	3	-2

Kelas Jabatan	B	K	-/+
Kelas 12	0	0	0
Kelas 11	0	4	-4
Kelas 10	0	0	0
Kelas 9	0	5	-5
Kelas 8	0	12	-12
Kelas 7	1	2	-1
Kelas 6	0	1	-1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>-23</b>

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

**PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA**

**UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

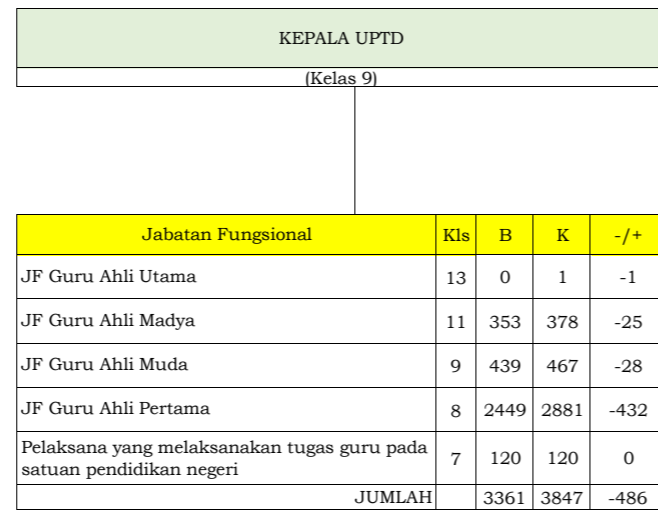
KEPALA UPTD
(Kelas 9)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	-/+
JF Guru Ahli Utama	13	0	0	0
JF Guru Ahli Madya	11	11	20	-9
JF Guru Ahli Muda	9	18	25	-7
JF Guru Ahli Pertama	8	13	17	-4
Pelaksana yang melaksanakan tugas guru pada satuan pendidikan negeri	7	5	5	0
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>	<b>67</b>	<b>-20</b>

Kelas Jabatan	B	K	-/+
Kelas 13	0	0	0
Kelas 12	0	0	0
kelas 11	11	20	-9
Kelas 10	0	0	0
Kelas 9	18	25	-7
Kelas 8	13	17	-4
Kelas 7	5	5	0
Kelas 6	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>67</b>	<b>-20</b>

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

**PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI**



Kelas Jabatan	B	K	-/+
Kelas 13	0	1	-1
Kelas 11	353	378	-25
Kelas 10	0	0	0
Kelas 9	439	467	-28
Kelas 8	2449	2881	-432
Kelas 7	120	120	0
<b>Jumlah</b>	<b>3361</b>	<b>3847</b>	<b>-486</b>

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE



PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA UPTD
(Kelas 9)

WAKIL KEPALA SATUAN PENDIDIKAN AKADEMIK				
JF Guru Ahli Muda	9	24	24	0
JUMLAH	24	24	0	

WAKIL KEPALA SATUAN PENDIDIKAN KESISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT				
JF Guru Ahli Muda	9	23	23	0
JUMLAH	23	23	0	

WAKIL KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA ADMINISTRASI				
JF Guru Ahli Muda	9	24	24	0
JUMLAH	24	24	0	

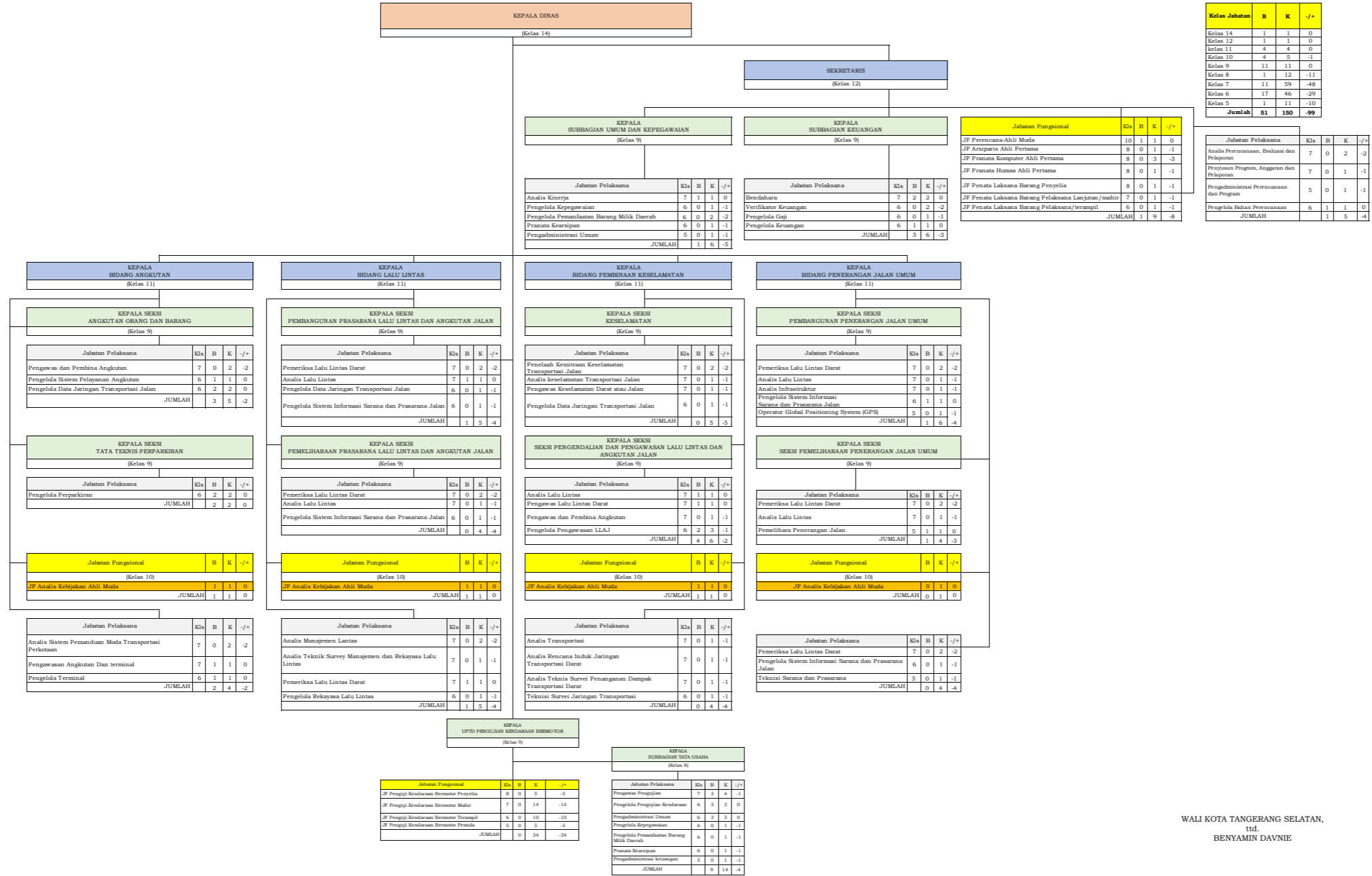
Jabatan Fungsional	Kls	B	K	./+*
JF Guru Ahli Utama	13	1	4	-3
JF Guru Ahli Madya	11	323	334	-11
JF Guru Ahli Muda	9	110	137	-27
JF Guru Ahli Pertama	8	641	744	-103
Pelaksana yang melaksanakan tugas guru pada satuan pendidikan negeri	7	14	14	0
JUMLAH		1089	1233	-144

Kelas Jabatan	B	K	./+*
Kelas 13	1	4	-3
Kelas 11	323	334	-11
Kelas 10	0	0	0
Kelas 9	181	208	-27
Kelas 8	641	744	-103
Jumlah	1146	1290	-144

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

**PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DINAS PERHUBUNGAN**

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR  
000.8.1/KEP/96-HUK/2023 TENTANG PETA JABATAN APARATUR  
SIPIL NEGARA



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE